

BUKTI BARU

Abdullah Rasyid: Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online, Alarm Baru Kedaulatan Digital Indonesia

Updates. - BUKTIBARU.COM

May 15, 2026 - 09:48



OPINI - Penggerebekan markas judi online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di Jakarta dan Batam bukan sekadar operasi kriminal biasa. Peristiwa ini adalah alarm serius tentang berubahnya wajah ancaman terhadap negara modern.

Dulu, ancaman terhadap kedaulatan identik dengan invasi militer, penyusupan bersenjata, atau konflik terbuka di perbatasan. Kini ancaman hadir jauh lebih senyap: melalui server digital, apartemen tertutup, rekening nominee, transaksi elektronik lintas negara, dan jaringan internet global.

Di tengah hiruk-pikuk kota besar Indonesia, sindikat internasional ternyata mampu membangun “pabrik judi online” yang bekerja secara sistematis dan profesional. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, bergerak dengan teknologi tinggi, memanfaatkan celah regulasi, dan beroperasi di balik layar laptop serta koneksi internet.

Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas kebijakan bebas visa ASEAN di tengah meningkatnya kejahatan siber lintas negara.

Tentu kebijakan bebas visa memiliki manfaat strategis. Ia memperkuat konektivitas kawasan, mempercepat arus bisnis, mendorong pariwisata, dan mempererat integrasi ekonomi ASEAN. Namun kasus ini menunjukkan bahwa keterbukaan tanpa pengawasan yang adaptif dapat berubah menjadi kerentanan nasional.

Indonesia kini menghadapi tantangan baru: bagaimana menjaga keterbukaan ekonomi tanpa membiarkan wilayahnya dipakai sebagai basis operasi kejahatan digital internasional.

Jakarta dan Batam menjadi lokasi favorit sindikat bukan tanpa alasan.

Jakarta menawarkan semua kebutuhan operasi digital modern: internet cepat, akses keuangan nasional, ribuan apartemen, ekosistem digital besar, dan mobilitas manusia yang tinggi. Dalam kota sebesar Jakarta, keberadaan operator asing mudah tersamarkan di tengah aktivitas urban yang padat.

Sementara Batam memiliki nilai strategis berbeda. Letaknya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia membuat mobilitas keluar-masuk menjadi sangat mudah. Sebagai kawasan perdagangan dan transit internasional, Batam ideal digunakan untuk rotasi personel, perpindahan dana, hingga penyamaran aktivitas lintas negara.

Namun ada satu aspek yang sering luput dibahas secara terbuka: keberadaan sponsor lokal Indonesia.

Dalam banyak kasus keimigrasian, WNA hampir tidak pernah berdiri sendiri. Mereka biasanya masuk menggunakan dukungan sponsor dari pihak di Indonesia, baik individu maupun badan usaha. Sponsor inilah yang sering menjadi pintu awal masuknya jaringan.

Karena itu, penanganan kasus judi online tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan operator asing di lapangan. Negara harus mengejar aktor lokal yang menjadi fasilitator.

Kita harus jujur mengakui bahwa sindikat sebesar ini hampir mustahil bekerja tanpa dukungan jaringan domestik. Mereka membutuhkan:

1. penyedia tempat tinggal,
2. pembuka rekening,
3. peminjam identitas,
4. perusahaan penjamin,
5. hingga pihak yang membantu pengurusan izin tinggal.

Artinya, ada ekosistem lokal yang ikut menopang operasi tersebut.

Di sinilah pentingnya evaluasi serius terhadap sistem sponsorship dan pengawasan orang asing di Indonesia. Sponsor tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai formalitas administrasi. Sponsor harus bertanggung jawab terhadap keberadaan dan aktivitas WNA yang dijaminnya.

Jika sponsor terbukti memfasilitasi atau membiarkan aktivitas ilegal, maka sanksi pidana, pencabutan izin usaha, hingga blacklist harus dilakukan secara tegas.

Karena itu, negara tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital nasional.

Pertama, memperkuat selective policy berbasis risiko. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen keamanan nasional. Negara harus semakin selektif terhadap pola kedatangan WNA yang berpotensi disalahgunakan.

Kedua, membangun integrated immigration intelligence. Data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, sponsor, hingga pola hunian harus terintegrasi dengan Polri, PPATK, BIN, Komdigi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa lagi bekerja secara sektoral.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperluas pengawasan ke wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, dan kantor tertutup sebagai basis operasi. Pengawasan keimigrasian tidak cukup berhenti di bandara dan pelabuhan.

Kelima, mempercepat penggunaan artificial intelligence dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Negara harus mampu membaca anomali sejak awal: kedatangan massal dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga transaksi digital mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala melalui pendekatan whole of government. Judi online adalah kejahatan multidimensi yang tidak mungkin ditangani oleh satu institusi saja.

Pemerintah juga perlu mulai mengevaluasi secara serius kebijakan bebas visa dan pola pengawasan terhadap negara-negara yang berulang kali muncul dalam kasus kejahatan siber dan judi online lintas negara. Evaluasi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, tetapi memastikan bahwa keterbukaan tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional.

Kasus Jakarta dan Batam memperlihatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia hari ini bukan hanya datang dari senjata, tetapi juga dari keyboard, server, dan jaringan keuangan ilegal global.

Kedaulatan di era digital bukan lagi semata menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.

Jika negara lengah, kota-kota besar Indonesia perlahan dapat berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bergerak senyap namun menghancurkan dari dalam.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.

Jakarta, 15 Mei 2026

Abdullah Rasyid

*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan